



SALINAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
dan  
BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.865.837.035.441,87 bertambah sejumlah Rp.65.905.460.121,02 sehingga menjadi Rp.931.742.495.562,89 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 745.953.464.971,18
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.066.517.714,73</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 774.019.982.685,91
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 865.837.035.441,87
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 65.905.460.121,02</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 931.742.495.562,89
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (157.722.512.876,98)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 130.796.333.040,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.082.761.245,29</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 163.879.094.285,98
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 10.912.762.570,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.756.181.161,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.156.581.409,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 157.722.512.876,98
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 19.612.260.467,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.303.912.328,22</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.22.916.172.795,22
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 688.833.587.879,88
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.280.081.655,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.691.113.669.534,88
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 37.507.616.624,30
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.482.523.731,51</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.59.990.140.355,81

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 2.717.003.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (301.200.000,00)
    - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 2.415.803.000,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 2.978.669.811,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 959.959.930,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 3.938.629.741,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 2.675.204.219,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 855.252.398,22
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.530.456.617,22
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp.11.241.383.437,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.789.900.000,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 13.031.283.437,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
    - 1) Semula Rp. 105.063.942.879,88
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 866.374.655,00
    - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 105.930.317.534,88
  - b. Dana alokasi umum
    - 1) Semula Rp. 513.570.135.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.513.570.135.000,00
  - c. Dana alokasi khusus
    - 1) Semula Rp. 70.199.510.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp.70.199.510.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp.0,00
  - b. Dana Darurat
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 13.791.478.372,30        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 14.001.811.383,51</u> |
- Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 27.793.289.755,81
- d. Sumbangan Pihak Ketiga
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 5.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.500.000.000,00)</u> |
- Jumlah dana sumbangan pihak ketiga setelah Perubahan Rp.3.500.000.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Dukungan Pemilukada
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>      |
- Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk dukungan Pemilukada setelah Perubahan Rp.2.000.000.000,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Harati
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 0,00             |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 5.149.758.100,00 |
- Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk DAK Kalteng Harati setelah Perubahan Rp.5.149.758.100,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Barigas
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 0,00             |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 3.000.000.000,00 |
- Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk DAK Kalteng Barigas setelah Perubahan Rp.3.000.000.000,00
- f. Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 16.716.138.252,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.830.954.248,00</u> |
- Jumlah Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi setelah Perubahan Rp. 18.547.092.500,00

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 239.714.593.853,69       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.373.641.863,17</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.252.088.235.716,86
- b. Belanja Langsung
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 626.122.441.588,18       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 53.531.818.257,85</u> |
- Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 679.654.259.846,03

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 179.894.697.891,02
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.898.947.694,72
    - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 191.793.645.585,7
  - b. Belanja bunga
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp. 2.397.988.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (992.000.000,00)
    - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 1.405.988.000,00
  - d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp. 18.811.985.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.900.000.000,00
    - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 21.711.985.000,00
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp. 3.236.400.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(1.085.604.900,00)
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.2.150.795.100,00
  - f. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp. 271.700.300,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(127.698.879,86)
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp.144.001.420,14
  - g. Belanja bantuan keuangan
    - 1) Semula Rp. 34.601.668.122,84
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (253.900.000,00)
    - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp.34.347.768.122,84
  - h. Belanja tidak terduga
    - 1) Semula Rp. 500.154.539,83
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.368.929,41
    - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.533.523.469,24
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 32.128.714.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (752.894.900,00)
    - Jumlah belanja pegawai setelah PerubahanRp. 31.375.819.100,00
  - b. Belanja barang dan jasa
    - 1) Semula Rp. 188.421.479.322,18
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 58.309.020.389,72
    - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.246.730.499.711,90

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 405.572.248.266,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.024.307.231,87)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 401.547.941.034,13

#### Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 130.796.333.040,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.082.761.245,29</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 163.879.094.285,98
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 10.912.762.570,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.756.181.161,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.156.581.409,00
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 130.796.333.040,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.082.761.245,29</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 163.879.094.285,98
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.000.000.000,00)
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
    - 1) Semula Rp. 5.870.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp.5.870.000.000,00
  - c. Pembayaran Utang
    - Utang kepada Pihak Ketiga
      - 1) Semula Rp. 42.762.570,00
      - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.757.190,00
 Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 68.519.760,00
    - Utang Jangka Pendek
      - 1) Semula Rp. 0,00
      - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 218.061.649,00
 Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 218.061.649,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 28 Oktober 2013

**BUPATI SERUYAN,**

**TTD**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**TTD**

**Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620724 199103 1 003**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2013 NOMOR 31 SERI A.**